

## ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT

Dito Aditia Darma Nasution<sup>1)</sup>, Mustafa<sup>2)</sup>, Annisa Fajariah Damanik<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi  
E-mail: ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

### Abstract

This research aims to analyze the financial accountability of Pematang Serai village, Langkat Regency. This research uses qualitative research methods. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation methods. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. The data analysis components used are data reduction, data display and conclusion drawing. The results of the research carried out stated that the financial management stages carried out by Pematang Serai Village were running in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Accountability, village finance, village fund, financial management, APBDes.*

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Cordery et al., 2023). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Ramadhan et al., 2023). Dengan hak tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, serta semakin terbuka (transparan) dan responsif terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan desa tersebut. Pengelolaan keuangan tidak hanya didukung oleh keuangan yang memadai tetapi juga membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal pula (Sari et al., 2022).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah (Sari & Azzahra, 2023). APBDes dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa (Supraja, 2024). Akan tetapi pada berbagai kasus sering dijumpai ketidakpercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa (Rahman et al., 2024). Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasi. Kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa sering terjadi kapan saja tanpa memperhatikan sumber dana yang dikelola (Panggabean, 2021).

Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat merupakan desa yang menerima aliran pendapatan yang berasal dari dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak yang merupakan bagian dari pendapatan transfer. Dengan adanya aliran pendapatan ini diharapkan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Tujuan pemberian dana desa yaitu untuk memprioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yaitu pada pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, lalu berlanjut pada pelaksanaan dan setelah dilaksanakan maka akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa (Jamil et al., 2022).

Desa Pematang Serai yaitu salah satu desa di Kabupaten Langkat dengan mayoritas penduduk adalah sebagai wiraswasta, petani dan peternak. Pada tahun 2022 Desa Pematang Serai memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.676.406.000,-. Dengan jumlah tersebut pemerintah desa harus dapat mengelolanya secara tepat sesuai dengan tujuan diberikannya dana tersebut yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Dengan jumlah dana yang diterima oleh desa, aparatur desa juga menyatakan bahwa jumlah tersebut masih belum dapat digunakan secara merata untuk kegiatan desa. Kegiatan desa harus disesuaikan dengan dana yang diterima desa pada tiap tahunnya.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan desa Pematang Serai berupa kegiatan pemberdayaan non fisik meliputi pelatihan aparat desa, kegiatan yang dilakukan pada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan ketahanan pangan. Sedangkan fisik yaitu pembangunan infrastruktur pertanian dan

pembangunan parit beton dikarenakan banjir yang sering datang kepemukiman warga semenjak adanya proyek jalan tol Trans Sumatera. Namun pembangunan seperti jalan aspal belum sepenuhnya masyarakat Desa dapat merasakannya dikarenakan jalan aspal yang dibangun baru sebagian saja tidak merata ke seluruh bagian Desa akibatnya banjir terkadang menggenangi jalan ketika hujan lebat datang.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa dan atasan Kepala Desa (pertanggungjawaban kepada yang lebih tinggi) tetapi juga harus dapat bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pertanggungjawaban kepada publik secara luas atau sesama lembaga lainnya. Pemerintah desa khususnya Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa yaitu dengan menyediakan papan pengumuman atau website desa agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti (Habu & Henderson, 2023). Ruang lingkup penelitian adalah mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena secara nyata yang terjadi untuk menganalisis akuntabilitas keuangan desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (McDermott, 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Desa Pematang Serai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, Ketua BPD serta Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa hasil wawancara dan observasi langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Komponen analisis data pada penelitian ini adalah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan pada masing-masing kegiatan. Untuk menghindari kesulitan Kaur Keuangan dalam membuat laporan akhir keuangan dan agar kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka tim pelaksana harus dapat menyertakan segala bentuk dokumen pengeluaran yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan APBDes yang ada kemudian disusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa sekaligus juga perintah bagi Kaur keuangan Desa. Pengajuan SPP oleh Tim Pelaksana Kegiatan juga dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja serta Bukti Transaksi. Setelah proses persetujuan/pengesahan belanja dilakukan oleh Kepala Desa melalui dokumen SPP maka langkah selanjutnya yaitu Tim Pelaksana Kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta output yang ada.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil analisa, ditemukan bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh Desa Pematang Serai sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini Desa Pematang Serai telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Pelaporan pelaksanaan APBDes dilakukan dalam dua tahap yaitu pelaporan APBDes semester pertama dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan asas transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Serai melalui 2 tahap yaitu laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedi Suhandi, S.E yang menyatakan bahwa: “Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Serai yaitu dengan melalui 2 tahap yaitu laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun. Semester pertama dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya”.

Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala Desa Pematang Serai yaitu Bapak Suliadi Solehan yang juga menyebutkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa melalui 2 tahap yaitu: “Bentuk pelaporan yang dilakukan yaitu melalui 2 tahap yaitu laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun. Jadi sistem pelaporannya yaitu semester pertama dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester kedua dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Dan setelah 2 tahap tersebut sudah terlaksanakan maka hal terakhir yang dilakukan yaitu dengan membuat laporan akhir yang merangkum 2 tahap kegiatan tersebut dan dilaporkan pada akhir periode sebelum 31 Desember tahun anggaran. Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Serai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini desa Pematang Serai telah menerapkan prinsip transparan dan Akuntabel yaitu pemerintah desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan diatasnya, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media tulis atau media informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suliadi Solehan, selaku Kepala Desa Pematang Serai yaitu: “Laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Pematang Serai sejauh ini telah dilakukan secara transparan, hal ini dilakukan agar semua masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat secara jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah

dilakukan pemerintah desa. Transparan ini kami lakukan dengan membuat baliho yang terdapat diteras Kantor Desa Pematang Serai”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Yuswanti selaku Sekretaris Desa Pematang Serai yaitu: “Pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan sudah transparatif dalam hal pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa yaitu dengan membuat grafik dana desa berupa papan anggaran desa yang diletak di depan kantor desa”. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Soni Kembaren, selaku Ketua BPD mengenai pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan desa yaitu: “Pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan desa ada dan itu bisa dilihat secara langsung melalui spanduk yang dibuat didepan kantor desa”. Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Dedi Irwansyah, selaku perwakilan Kepala Dusun mengenai pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan desa yaitu: “Mengenai informasi keuangan desa biasanya masyarakat tahu sendiri karena kan sudah dipasang didepan kantor desa, sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan dikantor desa otomatis juga mengetahui dan dapat melihatnya juga”. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan asas transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Pematang Serai sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini Desa Pematang Serai telah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan membuat baliho APBDes Desa Pematang Serai. Baliho ini dibuat dengan tujuan agar seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat kegiatan yang telah dijalankan serta penganggarannya.

## **SIMPULAN**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Pematang Serai telah dilaksanakan secara akuntabel, dikarenakan desa Pematang Serai telah partisipatif dalam melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat dalam perumusan perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Pelaksanaan dan penatausahaan desa Pematang Serai telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga alur pelaksanaan yang dilakukan sudah baik. Begitu juga dengan

pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Pematang Serai telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi pelaporan keuangan desa yaitu dengan membuat baliho/ papan pengumuman terkait laporan realisasi keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cordery, C. J., Goncharenko, G., Polzer, T., McConville, D., & Belal, A. (2023). NGOs' performance, governance, and accountability in the era of digital transformation. *British Accounting Review*, 55(5), 101239. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101239>
- Habu, A. A., & Henderson, T. (2023). Data Subject Rights As A Research Methodology: A Systematic Literature Review. *Journal of Responsible Technology*, 16(October). <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100070>
- Jamil, M. M., Abidin, N. H. Z., & Alwi, N. M. (2022). The governance structure on the role of internal auditors in environmental auditing practices: Cases of Malaysian local organisations. *Environmental Challenges*, 9, 100632. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100632>
- McDermott, R. (2023). On The Scientific Study of Small Samples: Challenges Confronting Quantitative and Qualitative Methodologies. *Leadership Quarterly*, 34(3), 101675. <https://doi.org/10.1016/j.leafqua.2023.101675>
- Panggabean, F. Y. (2021). Implementation of Government Financial Information Systems Toward Local Government Financial Statements: Case Study in Deli Serdang, Indonesia. *Journal of Social Sciences*, IV(2), 98–106. [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4\(2\).10](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).10)
- Rahman, M. M., Saha, S., & Hoque, M. (2024). Unveiling the link between environmental management accounting, energy efficiency, and accountability in state-owned enterprises: An integrated analysis using PLS-SEM and fsQCA. *Environmental Challenges*, 14(November 2023), 100832. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100832>
- Ramadhan, P. R., Panggabean, F. Y., & Lubis, N. P. (2023). Dehumanization of Village Financial Management: Erich Fromm's Perspective Accounting Reconstruction. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 2(5), 1638–1646. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Sari, A. K., Saputra, H., Arifin, K. H. B. K., & Aulia. (2022). Impact of Budget Waste on Infrastructure Development in Sibolga. *International Journal of Social, Service and Research*, 1(1), 1–6. <https://ijssr.ridwaninstitute.co.id/index.php/ijssr/>
- Sari, M. N., & Azzahra, A. S. (2023). Analysis of Factors Influencing the Financial Management Behavior of Medan City Students. *International Journal of Management Research and Economics*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v1i2.923>
- Supraja, G. (2024). The Role of Sales Accounting Information System in PT. Petro Gasindo Intiniaga. *Basic and Applied Accounting Research Journal*, 3(2), 76–81. <https://doi.org/10.11594/baarj.03.02.04>